

PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BANYUMAS

(Evaluasi Program Berdasarkan *Goal Oriented Model*)

*F a u z i *)*

Abstract: *This article presents the results of an evaluative study on the implementation of a national movement for early childhood education (Paudisasi movement) in Banyumas district. The selected program evaluation model that is goal oriented models. The study results showed that the general implementation of Paudisasi movement in Banyumas district has led to the achievement of the set program standards. Yet still found less than optimal program on every aspect of the program is based on criteria or indicators specified program. Necessary to optimize the implementation of a national movement programs for early childhood education in a more creative, substantive and qualitative.*

Keywords: *evaluation of the program, a national movement for early childhood education.*

Abstrak: *Artikel ini memaparkan hasil kajian evaluatif atas pelaksanaan gerakan nasional pendidikan anak usia dini (gerakan Paudisasi) di kabupaten Banyumas. Model evaluasi program yang dipilih yakni goal oriented model. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan gerakan Paudisasi di kabupaten Banyumas telah mengarah pada upaya pencapaian standar program yang ditetapkan. Namun demikian masih ditemukan kekurangoptimalan pelaksanaan program pada setiap aspek program berdasarkan kriteria atau indikator program yang ditetapkan. Diperlukan optimalisasi implementasi program gerakan nasional pendidikan anak usia dini secara lebih kreatif, substantif, dan kualitatif.*

Kata Kunci: *evaluasi program, gerakan nasional pendidikan anak usia dini.*

A. PENDAHULUAN

Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang dikenal dengan gerakan Paudisasi ditujukan untuk membangun

*) Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto.

kesadaran, memobilisasi dan mensinergikan segenap potensi bangsa agar secara bersama-sama bergerak dan berpartisipasi dalam pembangunan PAUD. Mobilisasi dan sinergi potensi dalam satu gerakan tersebut diarahkan untuk percepatan dan perluasan pelaksanaan PAUD yang bermutu, lebih terarah, sistematis, terukur, terkendali, serta tepat sasaran.¹

Dalam pelaksanaannya gerakan Paudisasi sepiantas terlihat mampu memotivasi, menggugah semangat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; serta yang sangat penting dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh program gerakan Paudisasi bagi upaya peningkatan penyebaran layanan PAUD.

Fenomena menarik sebagaimana paparan di atas patut dicermati secara seksama untuk melihat aspek substantif keberhasilan pelaksanaan suatu program. Jika dicermati secara seksama gerakan Paudisasi ternyata baru menyentuh tataran permukaan berupa pertumbuhan lembaga-lembaga PAUD dan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK). Dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang cenderung “asal-asalan”, “asal jalan”, kurang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak secara tepat. Demikian halnya pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Dalam hal pengelolaan ditemukan pengelolaan PAUD yang kurang memadai. Bahkan dengan banyaknya stimulasi bantuan (dana) program dari pemerintah tidak sedikit pengelolaan program kegiatan PAUD yang bernuansa “proyek”.

Kondisi kurang ideal sebagaimana paparan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program gerakan nasional Paudisasi masih jauh dari yang diidealkan. Pelaksanaan layanan PAUD yang bermutu, terlaksana secara lebih terarah, sistematis, terukur, terkendali, serta tepat sasaran yang menjadi orientasi program gerakan nasional PAUD sepiantas masih belum tercapai.

Fenomena-fenomena di atas akan berakibat “fatal” bagi tumbuh kembang anak di masa depan jika tidak segera dibenahi. Pendidikan anak usia dini sebagai fondasi bagi perkembangan anak manakala stimulasi yang diberikan tidak tepat bukan hasil positif yang akan

diperoleh justru sebaliknya. Akan jadi “bom waktu” jika fenomena kurang ideal tersebut tidak dilakukan pembenahan sesegera mungkin dalam implementasinya.

Agar dapat dilakukan penyempurnaan dan pembenahan secara tepat diperlukan data atau informasi yang akurat agar upaya yang dilakukan tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan riset untuk mengevaluasi pelaksanaan program gerakan nasional PAUD. Untuk kepentingan itulah diperlukan evaluasi implementasi program gerakan nasional PAUD.

Riset evaluasi program ditujukan untuk menilai keefektifan pelaksanaan suatu program kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada para pengguna dan *stakeholders*-nya untuk melihat kesesuaian antara standar atau indikator program dan pelaksanaannya di lapangan. Setiap pelaksanaan suatu program, perencana, pengelola, dan pelaksana program perlu mengetahui keberhasilan penyelenggaraan program. Dalam keadaan yang demikian evaluasi sangat diperlukan untuk memberikan informasi mengenai keterlaksanaan program. Dengan demikian evaluasi program berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, mendesak dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan program gerakan nasional PAUD yang telah berjalan memasuki tahun ketiga dan menjadi agenda jangka panjang pembangunan PAUD di Indonesia. Jika program yang dicanangkan untuk jangka panjang (2011-2025) tersebut tidak dilakukan evaluasi sesegera mungkin dikhawatirkan manakala tidak berjalan sesuai standar program akan berakibat fatal bagi kelangsungan pembangunan generasi bangsa masa depan melalui PAUD sebagai akibat tidak adanya kontrol di tahun-tahun awal program tersebut dilaksanakan.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi program gerakan Nasional PAUD yang terdiri dari empat aspek yakni: *pertama*, aspek pembelajaran dan peserta didik; *kedua*, aspek pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); *ketiga*, aspek sarana dan prasarana; dan *keempat*, aspek kelembagaan. Adapun model evaluasi program yang dipilih yakni *goal oriented model*. Hasil dari penelitian evaluasi program ini berupa rekomendasi yang berguna untuk melihat keberhasilan

pelaksanaan program yang telah lalu dan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan berikutnya.

B. ASPEK PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK

1. Pengembangan karakter

Pada kegiatan pembelajaran diperoleh informasi bahwa 43% guru selalu melaksanakan pengembangan karakter dalam pembelajaran, 42% sering, 15% kadang-kadang, dan tidak ada yang tidak pernah (0%). Data tersebut memberikan informasi bahwa sebagian besar guru PAUD telah melaksanakan pembelajaran dengan orientasi pada pengembangan karakter peserta didik.

2. Pengembangan kemampuan dasar

Kegiatan pembelajaran dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar peserta didik yakni pengembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, bahasa, sosial emosional. Diperoleh informasi bahwa 62% guru selalu melaksanakan pembelajaran dalam rangka mengembangkan kemampuan dasar, 30% sering, 8% kadang-kadang, dan tidak ada yang tidak pernah (0%).

3. Penyiapan bahan dan media pembelajaran

Terkait dengan aktivitas penyiapan bahan dan media pembelajaran diperoleh informasi bahwa kegiatan penyiapan bahan dan media pembelajaran belum merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh guru. Kegiatan penyiapan bahan dan media belajar hanya sebagai kegiatan yang kadang-kadang dilakukan oleh guru (62%). Hanya sebagian kecil guru yang sering (27%) dan selalu (2%) menyiapkan bahan dan media pembelajaran. Fenomena tersebut tentu saja sebagai fenomena yang tidak ideal dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Idealnya guru harus menyiapkan bahan ajar dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Penyiapan bahan dan media pembelajaran akan memungkinkan pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

Pengembangan bahan dan media pembelajaran yang dilakukan guru belum dilakukan melalui media cetak dan video. Terkait dengan pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan bahan

dan media pembelajaran diperoleh data 47% menyatakan tidak pernah, 43% kadang-kadang, dan hanya 10% yang sering mengembangkan bahan dan media melalui media cetak dan video. Kondisi tersebut diperparah oleh keadaan sebagian terbesar guru tidak pernah (52%) mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini tentu sangat terkait dengan masih rendahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan media elektronik untuk pembelajaran. Masih banyak guru PAUD tidak dapat mengoperasikan komputer dan media pembelajaran elektronik lainnya. Di samping itu tentu saja berkaitan dengan masih banyaknya satuan PAUD yang belum memiliki fasilitas pembelajaran untuk mengembangkan *e-learning*. Sebagian besar PAUD belum memiliki akses layanan internet sebagai fasilitas dasar bagi pengembangan pembelajaran berbasis *e-learning*.

4. Diversifikasi pola pembelajaran yang sesuai budaya dan potensi daerah

Diperoleh informasi 63% guru berada pada tahapan sering melaksanakan pembelajaran dalam pola beranekaragam dengan mempertimbangan budaya dan potensi daerah. Dengan demikian pola pembelajaran yang dilaksanakan belum selalu mempertimbangan budaya dan potensi daerah. Guru yang pola pembelajarannya selalu mempertimbangan budaya dan potensi daerah hanya 12%, masih lebih rendah dari yang kadang-kadang (23%). Bahkan masih ditemukan guru yang tidak pernah (2%) pola pembelajarannya dilaksanakan dengan mempertimbangan budaya dan potensi daerah.

5. Penguatan Layanan Kesehatan dan Gizi

Diperoleh informasi bahwa penguatan layanan kesehatan dan gizi selalu (52%) dilaksanakan, 37% sering melaksanakan, 10% kadang-kadang, dan tidak pernah 1%. Data tersebut memberikan informasi bahwa sebagian besar PAUD telah melaksanakan program penguatan layanan kesehatan dan gizi. Program penguatan layanan kesehatan dan gizi dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin, pemberian makanan tambahan, dan pengintegrasian dengan layanan terkait seperti pemeriksaan kebersihan dan kesehatan badan, pemeriksaan gigi.

6. Penguatan program *parenting*

Terkait dengan penguatan program *parenting* diperoleh informasi bahwa sebagian besar guru dan lembaga PAUD tidak pernah (73%) melaksanakan kegiatan penguatan program *parenting* PAUD, hanya 27% yang melaksanakan dan itupun dilaksanakan kadang-kadang. Dengan demikian pada kriteria ini masih jauh dari standar yang ditetapkan dalam program gerakan Paudisasi.

C. ASPEK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)

1. Pemenuhan kekurangan PTK PAUD

Keadaan PTK PAUD sebagian besarnya berstatus Non PNS, hanya sebagian kecil yang PNS. Bahkan untuk bentuk satuan PAUD TPA/KB/SPS seluruhnya Non PNS. Dari guru yang ada sebagian besar belum memiliki NUPTK. Diperoleh informasi bahwa penyebaran pemberian NUPTK PAUD belum merata baik dari aspek jenis satuan pendidikan maupun penyebaran antar kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang tidak satupun PTK PAUD yang telah memiliki NUPTK.

Adapun perbandingan antara PTK PAUD yang telah memperoleh NUPTK dan belum memperoleh NUPTK yakni 92% PTK PAUD belum mendapatkan NUPTK, baru sekitar 8% PTK PAUD yang telah memiliki NUPTK. Kondisi tersebut tentu saja sangat tidak ideal jika dikaitkan dengan pentingnya NUPTK bagi program penyediaan *data base* untuk program peningkatan kualitas serta kesejahteraan PTK PAUD.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan PTK PAUD, dilakukan dengan upaya memberdayakan komponen masyarakat (TP-PKK, Kader Posyandu, majelis taklim, dan organisasi keagamaan lainnya) sebagai pengelola/pendidik PAUD. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi berbagai komponen masyarakat sangat tinggi dalam penyelenggaraan PAUD.

2. Peningkatan kualifikasi pendidikan PTK PAUD

Pelaksanaan program peningkatan kualifikasi pendidikan dilakukan dengan mendorong pendidik PAUD yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 untuk melanjutkan studi S1. Program ini dilaksanakan dengan memberikan dukungan bantuan biaya pendidikan/beasiswa kualifikasi S1 kepada pendidik PAUD yang memenuhi syarat. Adapun jumlah pendidik penerima beasiswa kualifikasi S1 masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah pendidik PAUD yang belum S1.

3. Peningkatan Kompetensi PTK PAUD

Peningkatan kompetensi PTK PAUD dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan forum ilmiah lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pelatihan kurikulum PAUD, workshop perangkat pembelajaran PAUD, pelatihan pengelola PAUD, pelatihan teknik bermain dan bercerita, seminar tentang kecerdasan anak, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut kebanyakan diselenggarakan oleh organisasi profesi yakni Himpaudi, IGTKI, dan IGRA. Meskipun demikian dinas terkait memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Peningkatan Penghargaan dan Perlindungan PTK PAUD

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemberian penghargaan kepada PTK PAUD di antaranya dilakukan dengan kegiatan pemilihan guru dan kepala PAUD berprestasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi para guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas dan kinerjanya sehingga dapat berprestasi dibidang tugas. Atas prestasi yang diperolehnya guru dan kepala PAUD memperoleh *reward* (penghargaan) dari pemerintah melalui dinas pendidikan. Guru dan kepala PAUD berprestasi di tingkat kabupaten selanjutnya dikirim mewakili kabupaten Banyumas ke tingkat pemilihan Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan penghargaan juga dilakukan dengan memberikan honorarium/kesra terutama kepada guru non PNS. Honor/kesejahteraan guru PAUD non PNS tampaknya masih di bawah standar upah mi-

nimum kabupaten (UMK) Kabupaten Banyumas tahun 2013 sebesar Rp 877.500. Realitas di lapangan masih ditemukan PTK PAUD yang hanya mendapatkan honorarium Rp.100.000/bulan, dan itupun tidak selalu dibayarkan setiap bulan mengingat kondisi keuangan lembaga PAUD yang sangat minim karena harus didahulukan untuk membiayai operasional kegiatan pembelajaran. Bahkan tidak sedikit guru lembaga PAUD yang tidak mendapatkan honor.

D. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

1. Pemenuhan Prasarana PAUD

Dalam rangka memenuhi standar sarana dan prasarana PAUD, pemerintah melaksanakan program yakni: *pertama*, memberikan bantuan pembangunan fasilitas PAUD terpadu; *kedua* memberikan bantuan pembangunan lembaga PAUD Percontohan; *ketiga*, memberikan bantuan rehabilitasi fasilitas PAUD; *keempat* memberikan bantuan perluasan ruang belajar dan penunjang lainnya.

2. Pemenuhan Sarana Belajar PAUD

Fenomena menarik ditemukan di mana semua lembaga PAUD telah menyediakan sarana belajar berupa alat permainan edukatif (APE). Di antara APE yang banyak dimiliki oleh lembaga-lembaga PAUD di kabupaten Banyumas yakni kartu angka, balok-balok, *puzzle*, maket tempat ibadah, maket profesi, maket kebudayaan, ayunan, mandi bola, peluncuran, jungkat-jungkit, bola dunia, undaran, papan titian, bola sepak, simpai, kartu huruf, prosotan, kuda-kudaan, maket keluarga, maket hewan, maket kendaraan, alat musik, alat dapur, menara gelang, menara balok, rumah-rumahan, alat ronce, papan rambu-rambu, congklak, angklung, terowongan, kolam renang.

Adapun sumber pengadaan APE tersebut berasal dari berbagai sumber di antaranya bantuan dari pemerintah, bantuan donatur, dan kebanyakan diperoleh orang tua peserta didik dari sumbangan pembiayaan pendidikan yang besarnya variatif sesuai dengan kesepakatan.

E. ASPEK KELEMBAGAAN

1. Penataan Kelembagaan PAUD

Dalam rangka optimalisasi layanan PAUD diupayakan lembaga PAUD tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan dokumen data lembaga PAUD di kabupaten Banyumas diperoleh informasi bahwa semua kecamatan telah terjangkau oleh layanan PAUD. Namun demikian tidak semua bentuk layanan PAUD telah tersebar merata di seluruh kecamatan.

Penyebaran yang relatif merata menjangkau semua kecamatan hanya pada satuan PAUD berupa TK/RA. Adapun untuk TPA, KB, dan SPS masih banyak kecamatan yang tidak ada layanan dalam bentuk lembaga tersebut. Dengan demikian sangat dimungkinkan masih banyak anak usia dini yang berusia antara 0-4 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini mengingat banyak daerah yang tidak tersedia lembaga pendidikan TPA, KB, dan SPS untuk melayani anak usia di bawah usia TK/RA (4-6 tahun).

Dalam rangka penataan kelembagaan PAUD, dilakukan penataan perijinan bagi lembaga PAUD baru maupun lembaga PAUD lama. Untuk lembaga PAUD baru diharuskan melakukan pengajuan izin penyelenggaraan sebelum melaksanakan operasionalisasi lembaga. Adapun untuk lembaga PAUD lama dilakukan pendataan ulang izin penyelenggaraan sehingga semua lembaga PAUD diharapkan memiliki legalitas izin penyelenggaraan dari dinas terkait.

Secara administratif proses penataan kelembagaan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, lembaga PAUD yang sudah memiliki ijin diberikan Nomor Izin Penyelenggaraan. Selanjutnya lembaga PAUD yang telah memiliki nomor izin penyelenggaraan diajukan untuk mendapatkan Nomor Statistik Sekolah (NSS), untuk lembaga RA disebut dengan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSRA). Tahap selanjutnya memberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang dalam konteks lembaga PAUD disebut dengan istilah Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional. Untuk saat ini semua lembaga PAUD telah memiliki izin penyelenggaraan, Nomor Statistik Sekolah (NSS) atau Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSRA) dan Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).

Penataan kelembagaan PAUD juga dilakukan dengan menertibkan penyelenggaraan lembaga PAUD. Penertiban penyelenggaraan diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PAUD berjalan sesuai standar. Hal ini didasarkan oleh pemikiran bahwa upaya pemberian layanan pendidikan kepada anak harus dilakukan dengan berpedoman kepada standar yang ada agar tidak merugikan anak sebagai subjek belajar.

2. Peningkatan Mutu Lembaga PAUD

Upaya peningkatan mutu lembaga PAUD secara terus-menerus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu fasilitasi peningkatan mutu lembaga PAUD dalam mencapai standar nasional terus dilakukan. Peningkatan mutu dilakukan secara integratif antara upaya peningkatan mutu PTK PAUD, sumber belajar dan sarana pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran dalam rangka stimulasi tumbuh kembang anak.

Dalam bidang sumber daya manusia, guru PAUD difasilitasi untuk mencapai standar minimum kualifikasi pendidikan S1. Dalam bidang sarana dan prasarana diberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar, bantuan bahan belajar, bantuan alat permainan edukatif (APE). Terkait peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan peningkatan kompetensi dan *refreshment* secara periodik kepada PTK PAUD melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan seminar ilmiah.

Untuk mendukung upaya peningkatan mutu lembaga diupayakan juga dengan membentuk lembaga PAUD percontohan. Namun untuk pendirian lembaga PAUD percontohan yang dapat dijadikan model bagi lembaga PAUD lainnya masih tergolong sangat sedikit. Belum semua bentuk lembaga PAUD telah didirikan lembaga percontohnya mengingat baru pada bentuk satuan pendidikan TK dan itupun belum didirikan di setiap kecamatan. Adapun untuk lembaga PAUD di bawah pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sampai saat ini belum didirikan/ditetapkan satupun RA percontohan.

Untuk menjamin mutu layanan lembaga PAUD dilakukan penilaian kinerja dan/atau akreditasi satuan PAUD. Penilaian kinerja ditujukan untuk menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas melayani anak didik dan *stakeholders* lainnya.

Di samping itu, satuan PAUD juga dinilai melalui mekanisme akreditasi satuan PAUD. Terkait dengan status akreditasi, jumlah lembaga PAUD yang telah terakreditasi baru mencapai angka sekitar 37%, sedangkan 63% lainnya tidak atau belum terakreditasi. Terkait dengan status akreditasi secara garis besarnya lembaga PAUD dapat dikategorikan dalam tiga kategori yakni *pertama*, terakreditasi (37%); *kedua*, belum mengajukan akreditasi (40%); dan *ketiga*, sudah mengajukan akreditasi tetapi tidak terakreditasi (23%). Mencermati data tersebut jelas sekali masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi melebihi jumlah yang telah terakreditasi. Bahkan jumlah terbesarnya masih didominasi oleh lembaga PAUD yang belum pernah mengajukan akreditasi.

3. Pengintegrasian berbagai layanan PAUD menjadi PAUD terpadu

Kegiatan layanan PAUD diupayakan untuk dilakukan pengintegrasian dengan layanan PAUD secara terpadu. Membuka layanan KB atau TPA di lembaga TK/RA/BA yang sudah ada, atau sebaliknya merupakan tuntutan agar seluruh tahap perkembangan anak mendapatkan layanan secara tepat dan memadai.

Pengembangan PAUD terpadu pada setiap lembaga PAUD agar dapat memberikan berbagai bentuk layanan PAUD (TPA, KB, TK/RA) sehingga seluruh anak usia dini mulai 0-6 tahun dapat diberikan layanan tumbuh kembang secara optimal. Namun demikian dalam realitas penyebaran bentuk layanan PAUD masih didominasi bentuk layanan TK/RA yang hanya dapat memberikan layanan kepada anak usia 4-6 tahun, sedangkan bentuk layanan TPA dan KB masih sangat sedikit dan baru berkembang di wilayah perkotaan atau ibu kota kecamatan.

Di samping upaya di atas, upaya untuk mengintegrasikan layanan PAUD juga dilakukan dengan mengintegrasikan layanan PAUD dengan layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan bergizi menjadi kegiatan yang secara terprogram dilaksanakan oleh hampir semua lembaga PAUD. Pelibatan petugas kesehatan, kader posyandu telah tampak nyata dalam penyelenggaraan layanan tumbuh kembang anak.

4. Perluasan kelembagaan dan kemitraan

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka perluasan kelembagaan dan kemitraan penyelenggaraan PAUD yakni: *pertama*, mendirikan lembaga PAUD dengan memanfaatkan fasilitas lembaga keagamaan dan sosial (rumah ibadah, balai desa, dan fasilitas umum lainnya); *kedua*, melakukan kerjasama dengan organisasi mitra PAUD dan dunia usaha (*cooperate social responsibility*) untuk menambah atau mendirikan satuan PAUD baru; *ketiga*, mendirikan lembaga PAUD di daerah terpencil.

Kemitraan dalam pengembangan PAUD telah dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan di antaranya dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Irsyad Al-Islamiah dalam pengembangan lembaga PAUD. Termasuk upaya yang dilakukan dengan organisasi-organisasi yang berada di bawah agama Kristen. Peran yang sama juga dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan berbagai yayasan yang *concern* dengan pengembangan lembaga PAUD.

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi secara formal belum dilakukan. Namun demikian pelibatan PT secara nyata dilakukan dengan pelibatan para ahli dari PT dengan menjadikannya sebagai nara sumber dalam kegiatan seminar, fasilitator dalam kegiatan pelatihan dan workshop. PT telah berperan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM PAUD (PTK) dengan menjadikannya sebagai tempat studi para guru PAUD, lembaga-lembaga PAUD telah menjadi objek riset mahasiswa dan dosen untuk penyusunan skripsi, tesis, disertasi, dan penyusunan karya ilmiah lainnya; melakukan pendampingan terhadap lembaga-lembaga PAUD sebagai institusi mitra/basis dampingan dalam rangka penyiapan generasi masa depan.

5. Pengembangan Sistem Pendataan dan Informasi PAUD

Pengembangan sistem pendataan PAUD terpadu berbasis web dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Agama RI. Dinas pendidikan kabupaten dan kantor kementerian agama kabupaten Banyumas mengoperasionalkan secara teknis di lapangan untuk melakukan pendataan

lembaga PAUD dan sumber dayanya di wilayah tugasnya masing-masing.

Sistem pendataan berbasis web di antaranya dilakukan untuk pendataan satuan PAUD, pemberian nomor statistik sekolah atau nomor statistik RA, pemberian nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN), pendataan pendidik dan peserta didik, pendataan akreditasi satuan PAUD, pendataan sarana prasarana dan APE, pendaftaran dan pemberian NUPTK, sistem pemberian bantuan, sertifikasi pendidik, tunjangan fungsional guru non PNS, dan lain-lain.

Selanjutnya dikembangkan juga *e-Layanan* PAUD sebagai media informasi dan komunikasi antara penyelenggara dan pengelola PAUD dari tingkat satuan pendidikan sampai Kementerian. Untuk pemanfaatan *e-layanan* ini tampaknya belum optimal dilaksanakan mengingat tidak semua satuan PAUD telah memiliki fasilitas internet, di samping tentu saja masih rendahnya kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) sebagian besar pendidik dan pengelola PAUD.

F. SIMPULAN

Secara umum hasil evaluasi pada setiap aspek program menunjukkan bahwa gerakan Paudisasi di Kabupaten Banyumas telah mengarah pada upaya pencapaian standar program yang ditetapkan. Namun demikian masih ditemukan kekurangoptimalan pelaksanaan program untuk setiap aspek pada kriteria/indikator tertentu.

Pada aspek pembelajaran dan peserta didik ditemukan guru belum melakukan pengembangan bahan dan alat untuk pengembangan karakter; masih sangat sedikit guru yang memanfaatkan media cetak dan elektronik dalam rangkaian pembelajaran; media pembelajaran belum optimal memanfaatkan sumber belajar dan media berbasis potensi lokal. Demikian halnya belum optimalnya penguatan program PAUD berbasis keluarga (*parenting education*).

Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan ditemukan masih sedikitnya PTK PAUD yang telah memperoleh NUPTK; penerima beasiswa dan bantuan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi pendidikan S1 masih sangat sedikit jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi S1. Jumlah guru

PAUD yang telah tersertifikasi masih sangat sedikit; itu pun saat ini hanya diperuntukkan bagi guru TK/RA, sedangkan guru/tutor pada TPA/KB/SPS belum diberikan kesempatan untuk masuk kuota sertifikasi. Demikian halnya pemberian insentif/penghargaan bagi PTK PAUD terutama PTK Non PNS yang masih jauh dari standar layak, jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Terkait aspek sarana dan prasarana masih ditemukan prasarana belajar yang belum memenuhi standar layak, tidak memadai baik dari aspek fisik, kenyamanan, dan kesehatan. Alat permainan edukatif (APE) baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya banyak yang kurang memadai. Demikian halnya bahan ajar/buku dan media pembelajaran lainnya masih banyak yang kurang memadai baik kualitas maupun kuantitas.

Terkait aspek kelembagaan, layanan PAUD (khususnya TPA dan KB) untuk anak usia 0-4 tahun masih belum merata. Keberadaan TPA dan KB kecenderungannya masih berkembang di wilayah perkotaan belum sampai ke semua kecamatan, apalagi desa. Peran dunia usaha masih kurang optimal dalam pengembangan PAUD. Demikian halnya pemanfaatan media elektronik untuk pemberian layanan (*e-layanan*) informasi PAUD juga belum optimal.

ENDNOTES

¹ Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional, *Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011-2025* (Jakarta: Ditjen PUDNI, 2011), hlm. 69-70.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional. 2001. *Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011-2025*. Jakarta: Ditjen PAUDNI.
- Nawawi, Hadari dan M. Matini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bredenkamp, S., dan C. Copple (eds.). 1997. *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Program*. Washington D.C.: NAEYC.
- Catron, Carol E., dan Jan Allen. 1999. *Early Childhood Curriculum: A Creative Play Model*, Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.

- Chourmain, M.A.S. Imam. 2011. *Pendekatan-Pendekatan Alternatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crain, William. 2007. *Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi*. Terjemahan Yudi Santoso. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gestwicki, Carol. 2007. *Developmentally Appropriate Practice: Curriculum and Development In Early Education*. Canada: Thomson Delmar Learning.
- Jackman, Hilda L. 2009. *Early Education Curriculum A Child's Connection to the World*. Fourth Edition. USA: Delmar Cengage Learning.
- Morisson, George S. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Edisi Kelima, Terj. Suci Romadhona dan Apri Widiastuti. Jakarta: Indeks.
- Oriondo, Leonard Layola., and Eleanor M. Dallo Antonio. 1988. *Evaluating Educational Outcomes*. Manila: Rex Book Store.
- Roopnarine, Jaipaul L., dan James E. Johnson. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Berbagai Pendekatan*. Edisi Kedelapan, Cetakan ke-1. Terjemahan Sari Narulita. Jakarta: Kencana.
- Royses, David., Bruce Thyer, dan Deborah Padgett. 2000. *Program Evaluation: An Introduction*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- Rutman, Leonard. *Evaluation Research Methodology*. 1984. New Delhi: Sage Publication PVT Ltd.
- Tim Program Pascasarjana. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi PPS UNJ 2012*. Jakarta: PPs UNJ Press.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.